



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Penyaluran Subsidi Bakal Terganjil Pendataan
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : -

BERITA UTAMA

Penyaluran Subsidi Bakal Terganjil Pendataan

Penyaluran subsidi energi kerap kali terbentur persoalan data. Ada ego sektoral antar-kementerian yang harus diselesaikan.

by VINDRY FLORENTIN



Pencairan bantuan subsidi minyak goreng dan serbako di Kantor Pos Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, 15 April 2022. TEMPO/Prima Milla

- Sejumlah pihak mendesak pemerintah memperbarui data kesejahteraan sosial untuk subsidi energi.
- Selain data kemiskinan, pemerintah harus memperbarui data usaha kecil penerima subsidi elpiji.
- Akurasi data penting agar anggaran perlindungan sosial Rp 349 triliun tepat sasaran.

JAKARTA — Rencana perubahan skema subsidi energi, untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram, bakal menghadapi tantangan. Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Sudha, mengatakan perubahan subsidi yang berujung pada kenaikan harga elpiji menghadapi tantangan pendataan dan pengelompokan masyarakat penerima. "Demikian pula dengan mekanisme pendistribusiannya."

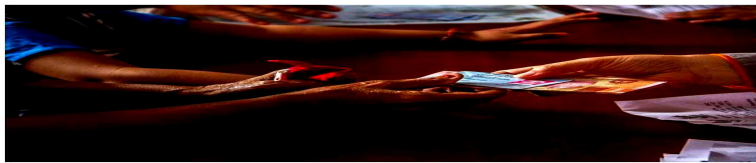
Menurut Satya, distribusi BBM bersubsidi bisa diterapkan dengan membuat nozzle atau selang khusus dan sistem digital di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun berbeda dengan penyaluran elpiji bersubsidi. "Masih dicari formula," ujar dia.



Rencana perubahan model subsidi itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arif Tasir dalam rapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu pekan lalu. Menurut dia, skema subsidi elpiji bakal dalam rencana jangka menengah-panjang. Sementara, bersama dengan penyesuaian formula harga serta paket subsidi energi BBM akan mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perkara data menjadi salah satu hambatan dalam penyaluran subsidi energi. Dalam rapat bersama Kementerian Sosial, pekan lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Saeid, mengatakan pembauran data kesejahteraan sosial (DTKS) harus segera diselesaikan lantaran menjadi hambatan bagi lembaga lainnya.

Adapun Kementerian Sosial mengklaim telah meningkatkan kualitas DTKS secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Contohnya, Kementerian Sosial juga sudah mulai membangun sistem berbasis digital, yaitu aplikasi Cek Bansos, yang diklaim lebih transparan.



ANTARA/Prima Milla

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bidang perlindungan sosial masih akan menjadi prioritas belanja pemerintah pada tahun depan. Kementerian menetapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 332-340 triliun. "Data untuk mereka yang akan mendapat bantuan akan dimutakhirkan, mengingat Kementerian Sosial juga akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan perlindungan sosial," ujar Sri Mulyani.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan skema penyaluran bantuan elpiji atau subsidi BBM bisa memakai model tertutup, seperti penyaluran langsung elpiji kepada masyarakat ataupun semi-tertutup, yaitu dengan memberikan kartu atau dana kepada masyarakat untuk membeli elpiji 3 kilogram yang dijual dengan harga pasar.

Masalahnya, dia melanjutkan, ada perkara lain dalam penerapan subsidi energi tertutup ataupun semi-tertutup, selain soal data. Persoalan itu adalah masalahnya pengalaman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyaluran subsidi. "Ada ego sektoral yang harus diselesaikan," ujar Fahmy.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan agar perubahan skema subsidi tidak dilakukan saat selisih harga antara barang subsidi dan non-subsidi terlalu lebar. Nisbatnya, ia khawatir transisi skema itu justru akan menimbulkan persoalan baru, yaitu kekacauan dalam distribusi elpiji.

Bhima menyelesaikan pemakai elpiji 3 kilogram yang berhak bukan hanya rumah tangga miskin, tapi juga pelaku usaha kecil dan mikro yang jumlahnya di atas 50 juta unit. "Jangan sampai perubahan skema subsidi di waktu yang salah akan menyebabkan tekanan biaya produksi pada usaha kecil," ujarnya.

Bhima mengatakan pemerintah juga belum memiliki data usaha kecil-menengah yang valid. Hal itu tercermin dalam pemberian bantuan usaha produktif yang masih dikurir oleh kekacauan data, tumpang-tindih penerima, serta sulitnya memverifikasi penerima bantuan. Dia menyarankan agar pemerintah tetap menyiapkan anggaran maksimal untuk subsidi supaya daya beli masyarakat terjaga saat kenaikan harga elpiji atau BBM berlangsung.

CASAR AKBAR | PRANCA GURITY | ANTARA

#Subsidi.BBM #Subsidi.Energi #Kenalkan.Harga.Elpiji